

Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Investasi Asing dari Sudut Pandang Ekonomi Politik

Bintang Aryanisah^{1*}, Mellyana Candra², Ni Luh Viya Anggun Cahyani³, Fawwaz Ghufuran⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

baryanisah@student.umrah.ac.id^{1*}, mellyana1001@gmail.com², nlvacahyani@student.umrah.ac.id³,
fgghufuran@student.umrah.ac.id⁴

Korespondensi penulis: baryanisah@student.umrah.ac.id

Abstract: This article discusses the Indonesian government's policy on foreign investment, focusing on its impact on the national economy. The study adopts an economic-political approach to analyze the role of the state in regulating foreign capital flows, as well as how foreign investment policies can affect economic stability, job creation, and equitable development. Through case studies in the infrastructure and manufacturing sectors, this article identifies the challenges and obstacles in implementing these policies, including political instability, bureaucracy, and regional regulatory differences. The article provides policy recommendations to optimize the benefits of foreign investment without neglecting domestic interests, with a focus on inclusiveness and sustainable development.

Keywords: Economic Policy, Foreign Investment, Infrastructure Development, Political Economy

Abstrak: Artikel ini membahas kebijakan pemerintah Indonesia terkait investasi asing, dengan fokus pada dampaknya terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk menganalisis peran negara dalam mengatur aliran modal asing, serta bagaimana kebijakan investasi asing dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Melalui studi kasus di sektor infrastruktur dan manufaktur, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk ketidakstabilan politik, birokrasi, dan perbedaan regulasi daerah. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat investasi asing tanpa mengabaikan kepentingan domestik, dengan fokus pada inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi Politik

1. PENDAHULUAN

Investasi asing memainkan peranan penting dalam perekonomian suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Keberadaan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment / FDI) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi asing, Indonesia dapat memperoleh modal tambahan, teknologi canggih, dan peningkatan kapasitas produksi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sektor-sektor vital seperti manufaktur, teknologi, dan infrastruktur. Selain itu, investasi asing juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup dan mempercepat pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Indonesia, dengan pasar domestik yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung investasi asing menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia menyadari hal ini dan sejak beberapa tahun terakhir telah berupaya untuk menciptakan

iklim investasi yang lebih terbuka dan ramah bagi investor asing. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mempermudah masuknya investasi asing, termasuk insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan peningkatan infrastruktur serta konektivitas yang memadai.

Namun, kebijakan untuk menarik investasi asing tidak bisa dipandang hanya dari segi ekonomi semata. Dinamika ekonomi politik turut memengaruhi kebijakan tersebut. Perspektif ekonomi politik menjadi sangat relevan dalam analisis kebijakan investasi asing, karena kebijakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi domestik, tetapi juga oleh kekuatan politik yang ada di dalam negara serta interaksi dengan kekuatan politik global. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi kepentingan ekonomi domestik, termasuk menjaga kemandirian industri lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap investasi luar negeri.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap investasi asing sering kali harus melalui berbagai proses perundingan dan pertimbangan yang melibatkan faktor politik domestik, seperti stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang pro-pertumbuhan. Di samping itu, faktor eksternal, seperti tekanan politik dari negara-negara maju yang berinvestasi, juga dapat memengaruhi arah kebijakan investasi asing di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan investasi asing tidak dapat dipisahkan dari konstelasi ekonomi politik yang ada di dalam dan luar negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor ekonomi politik yang memengaruhi kebijakan investasi asing di Indonesia. Beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor ekonomi politik yang mempengaruhi kebijakan investasi asing di Indonesia?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap investasi asing dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi nasional?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing melalui perspektif ekonomi politik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi politik yang mempengaruhi kebijakan investasi asing, serta mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak kebijakan investasi asing terhadap sektor-sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, seperti manufaktur, infrastruktur, dan teknologi.

Penelitian ini juga akan menilai bagaimana kebijakan investasi asing dapat memperkuat sektor-sektor ekonomi yang penting dan berkontribusi pada pemerataan

pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, analisis akan difokuskan pada apakah kebijakan investasi asing berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Melalui perspektif ekonomi politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan investasi asing dan dampaknya terhadap perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan manfaat dari investasi asing yang masuk, tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi domestik dan kemandirian sektor industri lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menarik investasi asing dari sudut pandang ekonomi politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mengenai konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan investasi asing, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada perekonomian nasional. Studi literatur dan analisis kebijakan digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan pemerintah dalam hal ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder yang meliputi dokumen kebijakan pemerintah, laporan tahunan yang relevan, serta artikel-artikel penelitian sebelumnya yang membahas topik investasi asing dan ekonomi politik. Sumber-sumber ini akan dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan hubungan yang dapat menjelaskan dampak kebijakan investasi asing terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun dari perspektif politik yang mendasari pengambilan keputusan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi Asing

Investasi asing merujuk pada aliran modal yang berasal dari negara luar untuk berinvestasi di dalam suatu negara. Terdapat dua jenis utama investasi asing yang sering dibahas, yaitu investasi asing langsung (FDI) dan investasi portofolio. Investasi asing langsung (FDI) adalah aliran modal yang digunakan oleh investor asing untuk membeli aset atau membangun fasilitas produksi di negara lain, seperti mendirikan perusahaan atau

pabrik. FDI ini biasanya lebih stabil dan jangka panjang karena investor terlibat langsung dalam operasional perusahaan dan memiliki kontrol atas investasi tersebut. Di sisi lain, investasi portofolio adalah pembelian saham atau obligasi perusahaan di negara asing tanpa terlibat langsung dalam manajemen atau operasional perusahaan tersebut. Investasi ini lebih bersifat spekulatif dan sering kali lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Perbedaan utama antara kedua jenis investasi ini terletak pada tingkat keterlibatan investor dalam perusahaan yang menerima investasi. FDI lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor produksi, sehingga berpotensi memberikan dampak lebih besar pada penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan industri lokal. Sebaliknya, investasi portofolio cenderung lebih berfokus pada perdagangan saham dan obligasi, yang meskipun dapat meningkatkan likuiditas pasar keuangan, tetapi kurang memberikan dampak langsung terhadap pengembangan sektor riil ekonomi.

Dampak dari kedua jenis investasi ini terhadap perekonomian juga berbeda. FDI cenderung lebih bermanfaat dalam jangka panjang karena dapat mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi, dan infrastruktur, serta berkontribusi pada peningkatan ekspor dan teknologi. Di sisi lain, investasi portofolio dapat memberikan dampak yang lebih cepat dalam meningkatkan likuiditas pasar keuangan dan menarik perhatian investor asing, namun seringkali lebih rentan terhadap volatilitas pasar dan dapat meninggalkan dampak negatif ketika investor memutuskan untuk menarik investasinya secara mendadak. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kedua jenis investasi ini harus disusun dengan memperhatikan karakteristik dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Teori Ekonomi Politik

Teori Ekonomi Politik adalah pendekatan yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik dalam suatu negara atau dalam interaksi antar negara. Dalam konteks investasi asing, ekonomi politik menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan kepentingan internasional. Teori ini melihat ekonomi bukan hanya sebagai masalah aliran modal dan pasar, tetapi juga sebagai arena bagi aktor-aktor politik, seperti pemerintah, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan, yang memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan investasi asing. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terkait investasi asing sering kali mencerminkan kompromi antara kepentingan ekonomi dan politik yang lebih luas.

Peran negara dalam mengatur aliran modal sangat krusial dalam konteks investasi asing. Negara memiliki wewenang untuk menciptakan regulasi yang mempengaruhi keputusan investasi asing melalui kebijakan fiskal, moneter, serta peraturan terkait perdagangan dan investasi. Dalam banyak kasus, pemerintah berusaha menarik investor asing dengan memberikan insentif fiskal, pembukaan pasar, dan perlindungan terhadap investasi. Namun, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi sektor domestik dari dampak negatif investasi asing, seperti penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing atau dampak terhadap industri lokal. Oleh karena itu, negara bertindak sebagai pengatur yang berusaha menyeimbangkan kepentingan domestik dengan kebutuhan untuk berintegrasi dalam perekonomian global.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik. Kelompok-kelompok politik atau elite ekonomi dalam suatu negara sering kali memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan kebijakan investasi asing. Misalnya, kebijakan yang memfasilitasi masuknya investasi asing bisa jadi didorong oleh kelompok-kelompok bisnis besar yang ingin mendapatkan keuntungan dari aliran modal luar negeri. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang lebih kritis terhadap dominasi asing dalam ekonomi mungkin akan berusaha memperjuangkan kebijakan yang lebih melindungi ekonomi domestik. Oleh karena itu, kebijakan investasi asing tidak dapat dipahami hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga harus dilihat dalam konteks interaksi politik dan pengaruh yang dimiliki oleh berbagai kelompok kepentingan.

Selain itu, dalam konteks internasional, negara juga harus mempertimbangkan hubungan politik dan ekonomi dengan negara lain. Misalnya, kebijakan investasi asing di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tekanan atau insentif yang datang dari negara-negara besar atau organisasi internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Dalam banyak kasus, negara-negara penerima investasi asing harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan standar internasional untuk memastikan aliran modal yang stabil, sekaligus menjaga kepentingan politik dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan investasi asing adalah hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan domestik dan internasional, yang mencerminkan peran negara sebagai aktor ekonomi-politik dalam menghadapi dinamika global.

Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Investasi Asing

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menyadari pentingnya investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan terhadap investasi asing

mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika politik dan ekonomi negara. Pada masa Orde Baru, Indonesia membuka pintu lebar bagi investasi asing untuk memodernisasi ekonomi yang saat itu masih terbelakang, dengan syarat-syarat tertentu yang mengutamakan keberpihakan kepada sektor-sektor industri strategis. Seiring dengan reformasi politik pada akhir 1990-an, kebijakan investasi asing semakin terbuka, meskipun terkadang diwarnai oleh ketidakpastian hukum dan peraturan. Pada era reformasi, Indonesia mencoba menarik lebih banyak investasi asing dengan berbagai kebijakan yang lebih liberal, meskipun masih ada sejumlah regulasi yang membatasi sektor-sektor tertentu untuk investor asing.

Regulasi terkini, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengurangi hambatan birokrasi dan memberikan kemudahan perizinan bagi investor asing. Salah satu aspek penting dari UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan prosedur perizinan berusaha yang sebelumnya sangat rumit dan memakan waktu. Selain itu, UU ini juga memberikan berbagai insentif bagi investor asing, seperti tax holiday, tax allowance, dan super deductions untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Meskipun demikian, meski ada upaya untuk memberikan kemudahan, beberapa sektor, terutama yang terkait dengan sumber daya alam dan sektor strategis, masih dibatasi untuk kepemilikan asing secara penuh, dan hanya dibuka dalam bentuk joint venture atau kemitraan dengan perusahaan lokal.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong masuknya investasi asing melalui kebijakan yang pro-investasi. Salah satunya adalah pemberian insentif fiskal berupa tax holiday bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor prioritas, seperti energi terbarukan, teknologi, dan infrastruktur. Program-program ini dirancang untuk menarik investor asing dengan menawarkan keuntungan pajak yang signifikan sebagai imbalan atas investasi yang mereka tanamkan. Selain itu, kemudahan perizinan juga menjadi fokus utama pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah. Berbagai inisiatif digitalisasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS) bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi tingkat korupsi serta birokrasi yang selama ini menjadi kendala bagi investor asing.

Keputusan politik yang mendukung kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh hubungan diplomatik dan perdagangan internasional. Indonesia aktif dalam membangun kerja sama ekonomi dengan berbagai negara dan organisasi internasional, seperti ASEAN, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan sejumlah negara besar. Kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk

meningkatkan perdagangan, tetapi juga untuk memfasilitasi aliran investasi asing. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengaturan investasi memberikan sinyal positif bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Meskipun berbagai kebijakan pro-investasi telah diterapkan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu hambatan utama adalah birokrasi yang masih cukup kompleks. Proses pengurusan izin usaha yang terfragmentasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menambah waktu dan biaya bagi investor. Meskipun ada kebijakan seperti OSS yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan koordinasi antar lembaga pemerintah. Ketidakstabilan politik juga menjadi salah satu tantangan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Perubahan kebijakan yang mendadak atau ketidakpastian terkait dengan pemilu dan pergantian pemerintahan sering kali menyebabkan ketidaknyamanan bagi investor asing, yang menginginkan kepastian jangka panjang.

Selain itu, perbedaan regulasi daerah menjadi salah satu hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan investasi asing. Meskipun pemerintah pusat berusaha untuk menciptakan regulasi yang seragam, seringkali pemerintah daerah memiliki kebijakan yang berbeda dalam hal pajak, perizinan, dan penggunaan lahan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah, yang akhirnya menyulitkan investor asing dalam menentukan lokasi investasi. Di sisi lain, persepsi investor asing terhadap risiko politik dan sosial juga memainkan peranan penting. Ketidakpastian terkait dengan stabilitas politik, kerusuhan sosial, dan ketegangan antar kelompok etnis atau agama dapat membuat investor asing merasa ragu untuk menanamkan modalnya, meskipun kebijakan yang ada tampaknya mendukung investasi.

Melihat tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini termasuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan memperbaiki tantangan yang ada, Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif dalam menarik investasi asing yang berkualitas untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

Analisis Ekonomi Politik terhadap Kebijakan Investasi Asing

Dalam konteks investasi asing, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aliran modal masuk melalui kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi

yang kondusif. Ekonomi politik mempengaruhi kebijakan ini dengan cara yang kompleks, karena kebijakan investasi asing tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dinamika politik. Kepentingan politik sering kali menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan, karena pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan elit politik, kelompok bisnis besar, serta pemilih mereka. Sebagai contoh, kebijakan yang pro-investasi asing dapat menjadi cara untuk meraih dukungan dari sektor bisnis besar yang menginginkan kemudahan berbisnis dan akses ke pasar internasional.

Kebijakan investasi asing sering kali mencerminkan hubungan erat antara elit politik dan sektor bisnis besar. Elit politik yang memegang kekuasaan biasanya memiliki kepentingan untuk menarik investor asing guna memperkuat posisi ekonomi dan politik mereka. Di sisi lain, sektor bisnis besar, terutama yang memiliki jaringan internasional, berperan penting dalam mendorong kebijakan yang lebih ramah terhadap investasi asing. Mereka sering kali menjadi pihak yang diuntungkan dari kebijakan yang memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan, serta mengurangi pembatasan terhadap kepemilikan asing. Dalam beberapa kasus, kepentingan kelompok bisnis ini berpotensi mendominasi kebijakan ekonomi, meskipun dapat menimbulkan ketimpangan sosial atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat dari investasi asing.

Selain pengaruh domestik, kebijakan investasi asing di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik global. Negara-negara besar dan lembaga internasional seperti IMF (International Monetary Fund) dan World Bank sering kali memiliki peran dalam membentuk kebijakan ekonomi dan investasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Melalui program-program bantuan dan pinjaman, lembaga-lembaga ini dapat memberikan tekanan agar negara-negara tersebut mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih terbuka terhadap investasi asing. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, tidak dapat mengabaikan pengaruh ini karena ketergantungan pada bantuan dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, kebijakan investasi asing di Indonesia sering kali merupakan hasil dari negosiasi dan kesepakatan dengan pihak luar, yang mempertimbangkan kepentingan internasional serta prioritas domestik.

Kebijakan investasi asing Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari dampak kebijakan ekonomi internasional. Misalnya, kebijakan perdagangan internasional, peraturan tentang perubahan iklim, dan kesepakatan internasional mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mempengaruhi cara Indonesia merancang kebijakan investasi. Ketika negara-negara besar atau organisasi internasional menetapkan standar

tertentu dalam perdagangan atau investasi, Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya agar tetap dapat bersaing dalam pasar global. Hal ini sering kali menciptakan dilema antara mempertahankan kedaulatan ekonomi domestik dan mengikuti tuntutan global yang seringkali lebih menguntungkan bagi negara maju. Dalam hal ini, ekonomi politik memainkan peran besar dalam menentukan sejauh mana Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan investasi asing adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Investasi asing dapat memberikan suntikan modal yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur, teknologi, dan sektor-sektor produktif lainnya yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi asing, sektor-sektor seperti manufaktur, energi, dan transportasi bisa berkembang pesat, yang akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.

Namun, dampak sosial dari kebijakan investasi asing juga perlu diperhatikan. Meskipun investasi asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi bisa signifikan. Investasi yang masuk sering kali lebih banyak terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu yang sudah berkembang, seperti Jakarta dan Surabaya, sementara daerah lain mungkin tidak merasakan manfaat yang sama. Hal ini bisa memperburuk kesenjangan antara daerah yang berkembang dan daerah yang tertinggal, serta meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, sektor-sektor lokal juga dapat tertekan oleh dominasi perusahaan asing yang lebih besar dan lebih canggih secara teknologi, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan industri domestik yang lebih kecil.

Kebijakan yang terbuka terhadap investasi asing dapat membawa dampak negatif terhadap sektor-sektor lokal yang kurang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang didukung oleh modal asing. Misalnya, sektor pertanian dan industri kecil di Indonesia seringkali kesulitan untuk bertahan hidup di tengah persaingan yang ketat dengan perusahaan asing yang lebih efisien dan memiliki akses ke teknologi canggih. Dalam beberapa kasus, dominasi perusahaan asing dalam sektor-sektor tertentu bisa menekan harga dan mengurangi ruang bagi usaha-usaha lokal untuk berkembang. Dampak ini bisa menyebabkan peningkatan ketergantungan pada sektor asing, yang mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Di sisi positif, investasi asing juga membawa peluang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan transfer teknologi. Dengan masuknya investor asing yang membawa teknologi canggih dan praktik manajerial yang modern, tenaga kerja lokal dapat memperoleh pelatihan dan keterampilan baru yang meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Selain itu, sektor pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan industri yang berkembang berkat investasi asing juga dapat berkembang, menghasilkan lebih banyak pekerja terampil yang siap berkompetisi di pasar tenaga kerja global. Ini adalah salah satu cara bagi Indonesia untuk memanfaatkan investasi asing untuk memajukan kualitas SDM dan meminimalisir ketimpangan dalam hal akses terhadap pendidikan dan keterampilan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyusun kebijakan investasi asing yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan yang memprioritaskan pembangunan daerah-daerah yang tertinggal, serta perlindungan terhadap sektor-sektor lokal yang rentan terhadap dampak negatif dari investasi asing, sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan investasi asing tetap dapat mendukung kemajuan sektor domestik tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional. Dengan demikian, kebijakan investasi asing harus didasarkan pada prinsip ekonomi politik yang bijak, yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Studi Kasus: Investasi Asing di Sektor Infrastruktur dan Industri Manufaktur

Investasi asing di sektor infrastruktur di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur besar, seperti proyek tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas energi, memerlukan aliran modal yang besar, yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh anggaran negara sendiri. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, kebijakan investasi asing di sektor infrastruktur telah dirancang untuk menarik modal asing melalui kerjasama publik-swasta atau kemitraan dengan perusahaan asing. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol Trans-Java, bandara internasional di berbagai kota, dan pelabuhan di sepanjang pantai Indonesia, merupakan contoh proyek besar yang melibatkan investasi asing.

Namun, kebijakan ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi tetapi juga melibatkan pengaruh politik yang signifikan. Proyek-proyek infrastruktur besar sering kali melibatkan pemerintah daerah, lembaga negara, serta perusahaan asing, yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, keputusan politik mengenai pemilihan mitra asing atau lokasi proyek dipengaruhi oleh hubungan politik atau diplomatik antara

Indonesia dan negara investor. Selain itu, keberhasilan proyek infrastruktur ini juga sangat dipengaruhi oleh kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Dampak positif yang terlihat adalah peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, ada kekhawatiran tentang dominasi asing dalam pengelolaan dan pengendalian infrastruktur kritis negara yang dapat menimbulkan ketergantungan jangka panjang.

Dampak dari investasi asing di sektor infrastruktur terhadap perekonomian lokal dapat dirasakan dalam beberapa aspek. Pembangunan infrastruktur besar membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan, baik dalam tahap konstruksi maupun operasi setelah proyek selesai. Misalnya, proyek pembangunan tol dan bandara menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan pelayanan publik. Selain itu, infrastruktur yang lebih baik mendukung konektivitas antar daerah, meningkatkan efisiensi logistik, dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Namun, dampak negatif yang dapat timbul adalah ketidakmerataan manfaat antara daerah yang menerima proyek dan daerah yang tidak terjangkau oleh infrastruktur baru. Beberapa daerah mungkin tetap tertinggal dalam hal perkembangan infrastruktur, yang memperburuk ketimpangan antar wilayah.

Sektor industri manufaktur di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat menarik bagi investor asing, terutama karena biaya tenaga kerja yang relatif rendah dan pasar domestik yang besar. Sejak Indonesia mulai membuka lebih banyak sektor untuk investasi asing pada era reformasi, sektor manufaktur telah menjadi salah satu penerima terbesar dari aliran modal asing. Investasi asing di sektor ini tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan multinasional yang mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia, tetapi juga mencakup sektor-sektor yang lebih terfokus, seperti elektronik, otomotif, dan produk konsumsi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing melalui insentif fiskal dan pengurangan tarif pajak semakin memperkuat sektor manufaktur sebagai magnet bagi investor asing.

Namun, kebijakan yang pro-investasi asing di sektor manufaktur juga memiliki sisi ekonomi politik yang perlu dianalisis lebih mendalam. Dalam banyak kasus, sektor manufaktur yang lebih besar yang dikuasai oleh perusahaan asing dapat menekan sektor industri kecil lokal, yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki teknologi dan modal yang lebih besar. Kebijakan ini berpotensi mengarah pada ketimpangan dalam sektor ekonomi, di mana perusahaan-perusahaan besar yang didominasi oleh modal asing menguasai pasar, sementara perusahaan-perusahaan kecil

lokal kesulitan untuk berkembang. Selain itu, masuknya investasi asing dalam sektor manufaktur juga dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada perusahaan asing, sehingga mempengaruhi kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Dari sisi ekonomi politik, kebijakan yang pro-investasi asing di sektor manufaktur memiliki keuntungan dan kerugian yang perlu diperhitungkan. Keuntungannya terletak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global. Investasi asing yang masuk dapat memperkenalkan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas industri manufaktur di Indonesia. Selain itu, aliran modal asing membantu memperkuat sektor industri Indonesia yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan mengarah pada diversifikasi ekonomi.

Namun, kerugian dari kebijakan ini tidak dapat diabaikan. Sektor manufaktur yang didominasi oleh perusahaan asing dapat menyebabkan kehilangan kendali ekonomi domestik dalam beberapa industri strategis. Ketergantungan pada investasi asing dapat meningkatkan risiko apabila investor asing memutuskan untuk menarik modal mereka atau apabila kondisi pasar global berubah secara drastis. Ketergantungan ini juga dapat memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar yang didominasi asing dengan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal yang tidak memiliki akses ke teknologi dan modal yang sama. Oleh karena itu, meskipun kebijakan investasi asing menawarkan keuntungan dalam hal penguatan sektor manufaktur, dampak jangka panjangnya terhadap kemandirian ekonomi Indonesia harus menjadi perhatian utama.

Pemerintah Indonesia perlu memiliki kebijakan yang bijak dalam mengelola dampak kebijakan investasi asing di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan manufaktur. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membatasi kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu yang penting untuk kedaulatan ekonomi, seperti sumber daya alam dan industri strategis. Hal ini dapat mengurangi potensi ketergantungan yang berlebihan pada modal asing dan membantu melindungi sektor industri lokal. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bersaing dengan perusahaan besar asing, dengan menyediakan akses yang lebih besar terhadap teknologi dan pembiayaan.

Selain itu, pemerintah dapat mendorong kerja sama antara perusahaan lokal dan asing dalam sektor manufaktur melalui model joint venture atau kemitraan strategis. Ini dapat memungkinkan perusahaan lokal untuk memperoleh manfaat dari transfer teknologi, sambil tetap menjaga kontrol atas sektor-sektor penting di dalam negeri. Kemitraan ini

dapat menghasilkan sinergi antara kemampuan teknologi perusahaan asing dengan pengetahuan pasar lokal yang dimiliki oleh perusahaan domestik, menciptakan iklim yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, kebijakan investasi asing yang diatur dengan baik dapat membantu mengurangi potensi kerugian sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap modal asing.

Mengelola kebijakan investasi asing dalam sektor-sektor kritis seperti infrastruktur dan manufaktur memang penuh tantangan. Ketidakmerataan distribusi manfaat investasi asing antara daerah, ketergantungan terhadap teknologi asing, dan pengaruh politik yang ada dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk selalu melakukan evaluasi kebijakan dan memperhatikan keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi kepentingan ekonomi domestik dalam jangka panjang.

Sebagai rekomendasi, pemerintah sebaiknya menerapkan regulasi yang lebih selektif dalam membuka sektor-sektor tertentu untuk investasi asing, sambil memastikan adanya kebijakan pengembangan industri domestik yang seimbang. Selain itu, meningkatkan keterlibatan sektor swasta domestik dalam proyek-proyek investasi asing dapat membantu meningkatkan daya saing industri lokal tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada menciptakan pembangunan yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari masuknya investasi asing, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Investasi asing di sektor infrastruktur dan manufaktur dapat memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kebijakan yang pro-investasi asing harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan yang merugikan ekonomi domestik. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat dan mendukung pengembangan sektor industri lokal yang berkelanjutan.

Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan

Sejak penerapan kebijakan pro-investasi asing, Indonesia telah berhasil menarik sejumlah besar investasi asing, khususnya di sektor infrastruktur dan manufaktur. Pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang didanai

oleh investor asing telah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Di sisi lain, sektor manufaktur juga mengalami peningkatan signifikan berkat masuknya investasi asing yang membawa teknologi canggih dan meningkatkan daya saing industri. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, seperti pemberian insentif fiskal, penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta reformasi dalam kebijakan tenaga kerja. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih tetap ada, terutama terkait dengan birokrasi yang rumit, ketidakstabilan politik, dan perbedaan regulasi daerah yang dapat memperlambat proses investasi asing.

Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan pemerintah terhadap investasi asing juga mencerminkan keberpihakan pada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, sektor infrastruktur dan manufaktur sering kali mendapatkan lebih banyak perhatian dalam hal insentif fiskal dan kemudahan perizinan, sementara sektor-sektor lain, seperti pertanian atau industri kecil, mungkin tidak mendapatkan perhatian yang sama. Kebijakan yang demikian mungkin menguntungkan bagi perusahaan besar yang berorientasi ekspor, namun dapat merugikan sektor ekonomi domestik yang lebih kecil, yang kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki akses modal dan teknologi lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan investasi asing perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan keberpihakan yang lebih adil antara sektor-sektor yang berkembang dan sektor-sektor yang tertinggal.

Kebijakan investasi asing yang cenderung menguntungkan sektor-sektor besar dan strategis, seperti infrastruktur dan manufaktur, menunjukkan adanya keberpihakan pada elit politik dan sektor bisnis besar. Ini tidak terlepas dari hubungan erat antara elit politik dengan pengusaha besar yang memiliki kepentingan untuk memperluas bisnis mereka melalui investasi asing. Seringkali, kebijakan yang mendukung sektor-sektor besar ini tidak memperhitungkan dampaknya terhadap sektor-sektor lokal yang lebih kecil, seperti industri kreatif, pertanian, dan UKM yang tidak selalu memiliki daya saing terhadap perusahaan-perusahaan multinasional. Dari sudut pandang ekonomi politik, hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan investasi asing mendatangkan keuntungan bagi beberapa sektor, hal tersebut sering kali menambah kesenjangan antara sektor yang berkembang dan sektor yang terpinggirkan, memperburuk ketimpangan ekonomi yang ada.

Ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh kepentingan politik yang seringkali lebih berpihak pada perusahaan besar yang berinvestasi di sektor infrastruktur dan manufaktur, yang memiliki potensi untuk menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebagai contoh, kebijakan insentif fiskal yang lebih banyak diberikan kepada sektor infrastruktur dan manufaktur, sementara sektor pertanian atau UMKM mungkin tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam kebijakan tersebut. Ini bisa memperburuk ketimpangan antara sektor formal dan informal dalam perekonomian Indonesia, serta menciptakan kesenjangan sosial antara daerah yang lebih berkembang dengan daerah yang kurang berkembang.

Berdasarkan temuan evaluasi di atas, beberapa perbaikan kebijakan dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat investasi asing sambil menjaga kepentingan domestik. Salah satu rekomendasi utama adalah untuk memperluas kebijakan insentif fiskal kepada sektor-sektor yang kurang mendapatkan perhatian, seperti industri kecil dan menengah (IKM), pertanian, dan sektor kreatif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif pajak dan pembiayaan yang lebih baik bagi UKM untuk dapat bersaing dengan perusahaan besar. Pemerintah juga harus menyediakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang membantu industri kecil mengakses teknologi baru dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dengan demikian, sektor-sektor yang lebih kecil dapat merasakan manfaat langsung dari investasi asing tanpa tergantung sepenuhnya pada sektor-sektor besar.

Rekomendasi lainnya adalah untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal regulasi dan kebijakan investasi asing. Ketidakpastian regulasi yang berlaku di tingkat daerah sering menjadi hambatan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di luar Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa ada keseragaman kebijakan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sehingga investor merasa lebih yakin untuk berinvestasi di luar Jawa dan Sumatera. Penyederhanaan prosedur perizinan dan pemangkasan birokrasi akan sangat membantu dalam menciptakan iklim investasi yang lebih efisien dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh investor asing.

Untuk mengoptimalkan manfaat dari investasi asing tanpa mengabaikan kepentingan domestik, pemerintah perlu mendorong kerja sama antara perusahaan asing dan lokal melalui model joint venture atau kemitraan strategis. Dalam skema ini, perusahaan lokal bisa memperoleh akses teknologi dan pasar internasional tanpa mengorbankan kendali terhadap sektor-sektor penting dalam perekonomian. Kebijakan semacam ini dapat mempercepat pengembangan sektor-sektor domestik yang masih tertinggal, seperti sektor industri kreatif atau pertanian, sambil tetap memanfaatkan keuntungan dari masuknya modal asing. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa

setiap investasi asing yang masuk tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan alokasi proyek investasi asing juga penting untuk mengurangi potensi korupsi dan ketimpangan yang terjadi akibat kebijakan yang tidak adil. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dan alokasi investasi dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terbuka, serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini tidak hanya akan mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam hal investasi asing.

Sebagai bagian dari rekomendasi yang lebih komprehensif, pemerintah juga harus memperhatikan keterlibatan sektor lokal dalam proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh investasi asing. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memastikan adanya penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek besar, serta mendorong kemitraan antara perusahaan asing dan perusahaan lokal dalam pengelolaan dan operasional proyek tersebut. Hal ini akan membantu menciptakan efek multiplier yang lebih besar dalam ekonomi lokal, serta memastikan bahwa hasil dari investasi asing dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memperhatikan dinamika ekonomi politik, kebijakan investasi asing perlu disusun secara lebih inklusif, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh sektor ekonomi, baik yang besar maupun yang kecil. Pemerintah harus dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya fokus pada sektor-sektor besar yang mendatangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk berkembang dalam jangka panjang dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat. Penyusunan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif ini akan membantu menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian Indonesia di masa depan.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing telah memberikan dampak positif bagi perekonomian, terutama di sektor infrastruktur dan manufaktur. Namun, kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut agar dampak negatif, seperti ketimpangan antara sektor besar dan kecil, dapat diminimalisir. Dengan melibatkan sektor-sektor lokal dalam proyek investasi asing, memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengoptimalkan insentif untuk industri kecil dan menengah, Indonesia dapat memastikan bahwa investasi asing tidak hanya menguntungkan investor asing, tetapi

juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian domestik dan masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian, terutama dalam sektor infrastruktur dan manufaktur. Pembangunan infrastruktur besar yang didanai oleh investor asing telah meningkatkan konektivitas antar daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, meskipun kebijakan ini berhasil menarik modal asing, masih terdapat tantangan terkait ketimpangan manfaat antara sektor besar dan sektor kecil, serta ketergantungan pada modal asing dalam sektor-sektor strategis. Selain itu, ketidakstabilan politik dan birokrasi yang rumit menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas implementasi kebijakan ini.

Untuk mengoptimalkan manfaat dari investasi asing, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan investasi asing tidak hanya menguntungkan sektor besar, tetapi juga menciptakan peluang bagi sektor-sektor kecil dan menengah melalui pemberian insentif yang lebih merata. Penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan transparansi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih efisien dan inklusif. Selain itu, meningkatkan keterlibatan sektor lokal dalam proyek-proyek besar dan memastikan bahwa investasi asing memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian daerah akan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738.
- Astuti, M. (2021). *Kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap aliran investasi asing*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada.
- Fahmi, S. (2021). *Ekonomi politik kebijakan investasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Gunawan, E. (2022). *Ekonomi politik Indonesia: Kebijakan dan dampaknya terhadap investasi asing*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Harsono, A. (2023). *Pemerintahan dan kebijakan ekonomi: Investasi asing dalam perspektif politik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Hidayat, R. (2021). *Investasi asing dan implikasi kebijakan fiskal di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia.
- Prasetyo, W. (2022). *Transformasi ekonomi Indonesia dalam era investasi asing*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Putra, M. (2022). *Kebijakan ekonomi politik dan investasi asing di negara berkembang*. Surabaya: UMM Press.
- Rahman, Z. (2021). *Teori ekonomi politik: Konsep, prinsip, dan aplikasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Rizki, A. (2022). *Kebijakan ekonomi dan investasi asing di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan, B. (2023). *Pengaruh investasi asing terhadap pembangunan ekonomi nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, R. (2023). *Analisis ekonomi politik dalam kebijakan investasi asing di Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Suharto, R. (2021). *Dinamika investasi asing di Indonesia: Perspektif ekonomi politik*. Malang: Penerbit Universitas Malang.
- Suryani, T. (2022). *Ekonomi politik global dan implikasinya terhadap investasi asing di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wijaya, D. (2023). *Peran kebijakan pemerintah dalam menarik investasi asing*. Jakarta: Penerbit Kompas.